

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Korea Selatan dan Jepang merupakan dua negara kuat yang berada di wilayah Asia Timur. Kedua negara ini secara geografi terletak berdekatan dan memiliki keunggulan yang sama di beberapa bidang seperti ekonomi, teknologi, dan budaya. Kedekatan geografis dan kesamaan kondisi di beberapa bidang, tidak membuat hubungan Korea Selatan dan Jepang menjadi harmonis. Kedua negara ini memiliki hubungan yang pasang surut. Hal ini dikarenakan hubungan masa lalu mereka terkait peristiwa penjajahan yang dilakukan oleh Jepang terhadap Korea selama 35 tahun.

Korea merupakan sebuah wilayah yang diperebutkan oleh banyak penguasa seperti China, Jepang, dan Rusia. Tiga penguasa besar ini berlomba-lomba untuk menjadikan Korea sebagai wilayah koloni mereka. Akibatnya, terjadi konflik antar sesama penguasa demi mendapatkan kekuasaan untuk menguasai Korea. Satu-satunya pihak yang diterima dengan baik oleh Korea adalah China, karena dianggap mampu memberikan perlindungan keamanan bagi Korea. Namun, perlindungan itu melemah pada 1895, ketika China kalah dari Jepang dalam *Sino-Japanese War*. Kalahnya China membuat akses Jepang menuju Korea semakin dekat. Jepang sendiri sangat ingin menguasai Korea karena menilai wilayah tersebut cocok untuk dijadikan tempat ekspansi industri dan agrikultur Jepang (Lew, 2000). Langkah Jepang untuk menguasai Korea semakin dekat setelah mampu mengalahkan Rusia dalam perang *Russo-Japanese War* pada tahun 1905.

Setelah berhasil mengalahkan China dan Rusia, Jepang keluar sebagai pemenang dan memiliki akses yang

lebih leluasa untuk menguasai Korea. Jepang akhirnya berhasil menguasai Korea pada tahun 1910 setelah melakukan pembunuhan terlebih dahulu terhadap anggota keluarga kerajaan Korea (Lew, 2000). Selama berada dibawah pendudukan Jepang, penduduk Korea mengalami berbagai tindakan penindasan dan mengalami kesengsaraan akibat eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh Jepang. Motif Jepang menguasai Korea adalah untuk melakukan eksploitasi dan menjadikan Korea sebagai wilayah pemasok kebutuhan ekonomi dan militer Jepang yang saat itu aktif terlibat dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II (Lew, 2000).

Jepang melakukan eksploitasi sumber daya manusia sekaligus sumber daya alam Korea (Lew, 2000). Para penduduk Korea baik laki-laki maupun perempuan dibawa dan dipindahkan ke berbagai wilayah yang dikuasai oleh Jepang seperti ke salah satu pulau Jepang, ke Singapura, dan ke Indonesia. Penduduk laki-laki Korea dipaksa bekerja sebagai pekerja untuk membangun infrastruktur seperti jalan dan pertambangan. Tidak hanya itu, penduduk laki-laki Korea juga dijadikan tentara pembantu Jepang untuk menyerang dan menghalau para musuh (Yoon&Setiawati, 2003). Sementara itu, penduduk perempuan Korea diambil paksa untuk bekerja dibawah perintah Jepang, mereka dipekerjakan di pabrik industri pertahanan dan unit kesehatan. Segala jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk Korea adalah atas dasar paksaan Jepang. Tidak hanya itu, warga Korea dilarang menggunakan budaya Korea, mereka dipaksa untuk memakai nama Jepang, dan berbicara dengan bahasa Jepang.

Korea akhirnya mampu lepas dari penjajahan Jepang pada tahun 1945, saat Jepang diserang dan dikuasai oleh Sekutu. Kejadian tersebut membuat Jepang dinyatakan kalah dalam Perang Dunia II. Sesaat setelah kejadian, Jepang menarik mundur seluruh pasukannya yang tersebar diberbagai wilayah di Asia, termasuk di Korea. Hilangnya

Jepang dari wilayah Korea, membuat Korea menyatakan diri bahwa mereka adalah negara yang merdeka. Wilayah Korea sendiri kini terbagi menjadi dua yakni Korea Utara dan Korea Selatan. Perpecahan di wilayah Korea ini merupakan akibat dari adanya Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Russia.

Setelah tahun 1945, Korea Selatan terus menguatkan posisi sebagai negara yang merdeka dan mampu bergaul dengan dunia internasional dengan melakukan banyak kerjasama dengan berbagai negara. Sementara itu, Jepang berupaya untuk membangun kembali negaranya pasca kalah dalam Perang Dunia II. Sebagai pihak yang kalah perang, Jepang berkewajiban bertanggung jawab atas kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan dari perang. Bentuk tanggung jawab Jepang adalah dengan memberikan biaya ganti rugi dan bantuan kepada negara-negara yang pernah mereka serang, taklukan, dan jajah. Bantuan tersebut sedikit-banyak membantu pengembalian citra Jepang sebagai negara yang baik.

Meskipun peristiwa penjajahan Jepang terhadap Korea Selatan sudah lama berakhir. Hubungan kedua negara tidak menunjukkan hubungan yang bersahabat. Seringkali hubungan Jepang dan Korea Selatan mengalami pasang-surut dimana terkadang mereka mampu bekerjasama namun dilain kesempatan mereka akan berada disisi yang berseberangan. Hubungan Korea Selatan dan Jepang semakin memburuk ketika muncul isu kejahatan perang yang bergaung di Korea Selatan dan menuntut penyelesaian dan tanggung jawab atas korban kejahatan perang yang dilakukan oleh Jepang.

Dari berbagai tuntutan yang ditujukan kepada Jepang, isu perbudakan seks merupakan isu yang paling menjadi perhatian. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pada saat Perang Dunia ke-II, Jepang membentuk *Japanese Military Comfort Woman System* yang bertugas untuk menyediakan

dan mengatur kebutuhan seksual tentara Jepang di daerah jajahan (Putri, 2018) *Japanese Military Comfort Woman System* memiliki program untuk mendirikan sebuah kamp atau asrama militer khusus bernama *comfort station* yang digunakan sebagai tempat bagi tentara Jepang memenuhi kebutuhan seksualnya. Di *comfort station*, Jepang menyediakan perempuan-perempuan yang diperintahkan untuk memenuhi kebutuhan seksual para tentara Jepang agar semangat juang para tentara meningkat dalam mengabdikan untuk Jepang (Putri, 2018).

Para perempuan yang berada dalam *comfort station* disebut dengan *comfort women* yang pada awalnya merupakan para pekerja seks komersial. Namun, para pekerja seks komersial ini banyak yang mengidap penyakit kelamin sehingga *Japanese Military Comfort Woman System* melakukan tipu daya dengan mengiming-imingi para perempuan di negara jajahan dengan pekerjaan tertentu padahal mereka nantinya akan ditempatkan di *comfort station*. Kebutuhan akan *comfort women* terus meningkat dengan banyaknya perempuan yang terjangkit penyakit dan meninggal, akhirnya *Japanese Military Comfort Woman System* menculik dan mengambil paksa para perempuan yang ada di daerah jajahan untuk dijadikan *comfort women* (Putri, 2018). Keberadaan *comfort station* terus berkembang dan menyebar disetiap daerah jajahan Jepang hingga tahun 1945.

Para perempuan yang menjadi *comfort women* mengalami eksploitasi dimana mereka dipaksa untuk melayani tentara Jepang berkali-kali dalam satu hari. Tidak jarang, para *comfort women* dipindahkan ke wilayah jajahan Jepang lainnya di luar Korea. Besarnya penderitaan yang dirasakan oleh para *comfort women* membuat banyak dari mereka berupaya melarikan diri dan bunuh diri. Angin segar bagi para *comfort women* mulai terasa menjelang kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, Jepang menutup *comfort*

*station* dan memulangkan para *comfort women* ke daerah asal dan kepada keluarga mereka.

Pasca Perang Dunia II, Jepang menutup rapat isu *comfort women* dari pengetahuan masyarakat. Para korban *comfort women* pun merasa membicarakan hal yang menimpa mereka adalah hal yang tabu. Akibatnya, isu *comfort women* menjadi terkuburkan, dan Jepang mampu membangun citra baiknya dengan mudah di ranah internasional. Namun, situasi tenang ini mulai mengalami gejolak ketika salah satu korban *comfort women* memutuskan untuk menyuarakan isu ini pada tahun 1991 dan menuntut pertanggung jawaban dari Jepang atas kasus perbudakan seks (Putri, 2018). Berkat keberanian satu orang, korban-korban budak seks tentara Jepang yang lain akhirnya turut membuka suara. Para korban ini akhirnya didampingi oleh komunitas lokal untuk mengawal isu tersebut agar dapat diselesaikan oleh Pemerintah Korea Selatan (Fauzia, 2017).

Pada awalnya, Jepang tidak mengakui adanya kasus perbudakan seks tersebut sehingga mereka menolak untuk memberikan pernyataan maaf dan kompensasi tanggung jawab kepada para korban. Tingginya tekanan yang diterima Jepang oleh dunia internasional membuat Jepang akhirnya pada tahun 2015 memutuskan setuju untuk melakukan pertemuan dengan Korea Selatan untuk membahas isu perbudakan seks. Pertemuan Korea Selatan dan Jepang menghasilkan sebuah perjanjian antara kedua negara yang bernama *2015 Japan-ROK Agreement on Comfort Women* (Putri, 2018).

Perjanjian Jepang dan Korea Selatan tentang *comfort women* ini berisikan persetujuan Jepang untuk membayar ganti rugi sebanyak 1 milyar yen (\$8.3m, £5.6m) dan pencopotan patung *comfort women* yang ada di depan gedung Kedutaan Besar Jepang untuk Korea Selatan (BBC, 2015). Perjanjian ini juga bersifat mengikat dimana kedua

belah pihak berkewajiban untuk tidak saling mengkritik masalah *comfort women* di forum internasional. Korea Selatan sepakat untuk mempertimbangkan perjanjian ini sebagai akhir dari masalah dan menyatakan bahwa perjanjian ini tidak bisa dibatalkan (BBC, 2015).

Perjanjian ini merupakan bukti bahwa Korea Selatan dan Jepang telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang membuat kedua negara dalam kondisi krisis diplomatik. Jepang menyatakan bahwa isu *comfort women* adalah benar adanya, dan meminta maaf lewat telepon kepada seluruh para korban perbudakan seks (BBC, 2015). Perjanjian ini membuat kondisi diplomatik antara Jepang dan Korea Selatan kembali membaik.

Tenangnyanya hubungan antara Korea Selatan dan Jepang nyatanya tidak berlangsung lama. Korea Selatan pada tahun 2017 menyatakan bahwa akan meninjau kembali *2015 Japan-ROK Agreement on Comfort Women*. Pada tahun 2018, Korea Selatan menyatakan akan menutup yayasan Reconciliation and Healing Foundation (Kang, 2018). Selama dua tahun berturut-turut yakni 2018 dan 2019, Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha menyinggung persoalan *comfort women* dipertemuan United Nations Human Rights Council (UNHRC). Tindakan-tindakan Korea Selatan ini bertentangan dengan isi perjanjian *2015 Japan-ROK Agreement on Comfort Women* dan menyebabkan hubungan antara Korea Selatan dan Jepang kembali dalam situasi krisis.

Pernyataan dan tindakan Korea Selatan yang masih membahas isu *comfort women* dan mempermasalahkan *2015 Japan-ROK Agreement on Comfort Women*, menurut penulis menunjukkan adanya suatu masalah dalam hal isi atau penerapan dari kesepakatan tersebut. Penulis menyakini adanya alasan dan motif tertentu yang mendasari sikap dan tindakan Korea Selatan terhadap *2015 Japan-ROK Agreement on Comfort Women*. Oleh karena itu, penulis

ingin mengkaji lebih jauh alasan perubahan perilaku Korea Selatan terhadap Jepang setelah adanya *2015 Japan-ROK Agreement on Comfort Women* yang mengikat keduanya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah berupa, **mengapa Korea Selatan melakukan tindakan yang bertentangan dengan isi Perjanjian 2015 Japan-ROK Agreement on Comfort Women?**

## **C. Kerangka Pemikiran**

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, penulis menggunakan satu landasan konsep yaitu kebijakan luar negeri menurut James N. Rosenau.

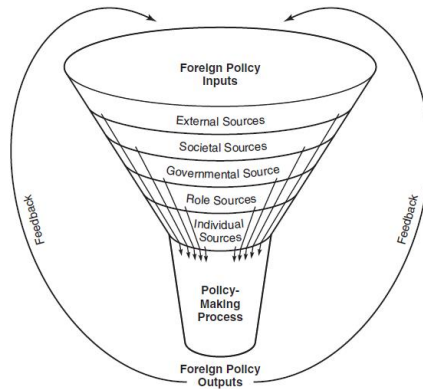
### **1. Kebijakan Luar Negeri (James N. Rosenau)**

Kebijakan luar negeri menurut James N. Rosenau merupakan sebuah tindakan otoritatif yang diambil oleh pemerintah dalam mempertahankan aspek yang diinginkan dari lingkungan internasional atau dalam mengubah aspek yang tidak diinginkan (Dugis, 2007). Rosenau menyatakan bahwa kebijakan luar negeri merupakan hasil dari kalkulasi kebijakan yang sesuai dengan orientasi tujuan negara (Dugis, 2007). Dari pengertian Rosenau maka kebijakan luar negeri adalah sebuah tindakan pemerintah hasil kalkulasi kebijakan-kebijakan tertentu yang paling sesuai dengan tujuan negaranya terkait mempertahankan atau mengubah aspek tertentu dari lingkungan internasional.

Dalam perumusan kebijakan luar negeri, Rosenau menyatakan ada lima hal yang mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri

suatu negara. Unsur-unsur tersebut adalah sistem internasional (*external sources*), kondisi sosial dalam negeri (*societal sources*), lembaga pemerintah pembuat kebijakan luar negeri (*governmental sources*), peran birokratik pembuat kebijakan (*role sources*), karakteristik individual dari elit kebijakan luar negeri (*individual sources*).

Gambar 1.1. Funnel of Casuality Foreign Policy



Sumber: Eugene Wittkopf, 2008

Pertama, sistem internasional (*external sources*), unsur ini membuat negara harus memperhatikan keadaan internasional agar dapat memberikan respon yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya (Cox&Stokes 2012). Kondisi internasional yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara tergantung dari karakteristik dan tindakan negara lain atau aktor non-negara yang ada di lingkup internasional terhadap negara tersebut (Wittkopf, 2008).

Kedua, kondisi sosial dalam negeri (*societal sources*), unsur ini berkaitan dengan tindakan, nilai, dan kepercayaan yang berkembang dalam lapisan



masyarakat (Cox&Stokes 2012). *Societal sources* juga berkaitan dengan karakteristik masyarakat dalam negeri dan sistem politik dalam negeri yang nantinya akan membentuk orientasi negara terhadap dunia internasional. Pengambilan kebijakan luar negeri juga dipengaruhi oleh opini publik yang terbentuk dari kumpulan informasi dari media massa dan kelompok kepentingan (Wittkopf, 2008).

Ketiga, lembaga pemerintah pembuat kebijakan luar negeri (*governmental sources*), lembaga ini memiliki kewenangan untuk memberikan berbagai pertimbangan akan pilihan kebijakan luar negeri suatu negara (Cox&Stokes 2012). *Governmental sources* terdiri dari berbagai aspek dalam pemerintahan khususnya dari lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang nantinya akan membentuk proses birokrasi antar lembaga dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Terlepas dari banyaknya lembaga yang dapat mendorong pembentukan kebijakan luar negeri, presiden tetaplah menjadi pusat dan pihak utama dalam perumusan kebijakan luar negeri (Wittkopf, 2008).

Keempat, peran birokratik pembuat kebijakan (*role sources*), para pembuat kebijakan akan menyarankan kebijakan-kebijakan berdasarkan bidang yang mereka geluti dalam pemerintahan (Cox&Stokes 2012). Posisi para pembuat kebijakan dalam pemerintahan mempengaruhi perilaku mereka dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan luar negeri. Para birokratik ini akan memiliki kontribusi dalam memberikan informasi, mengidentifikasi masalah, mengadvokasi solusi dan menjalankan perintah presiden (Wittkopf, 2008).

Kelima, karakteristik individual dari elit kebijakan luar negeri (*individual sources*), segala

macam karakteristik yang dimiliki individu dipercaya dapat mempengaruhi tindakan dan pikiran individu tersebut terhadap sesuatu, termasuk dalam mengeluarkan kebijakan tertentu (Cox&Stokes, 2012). *Individual sources* berkaitan erat dengan persepsi individu tersebut terhadap sesuatu. Persepsi tersebut datang dari memori, nilai, kebutuhan, dan kepercayaan yang tertanam dalam diri individu sejak lama (Wittkopf, 2008).

Proses pembuatan kebijakan luar negeri sangat dipengaruhi oleh kelima unsur tersebut sebagai sumber atau landasan dalam perumusan kebijakan luar negeri. Kelima unsur tersebut saling memberikan dorongan dan kontribusi tertentu dalam perumusan kebijakan luar negeri sehingga kebijakan luar negeri yang keluar nantinya sesuai dengan orientasi dan kepentingan nasional. Dalam penerapannya, seringkali ada satu unsur dominan yang mempengaruhi unsur-unsur lainnya dalam pembuatan kebijakan luar negeri.

Diantara lima aspek yang dijelaskan oleh James N. Rosenau, aspek *societal sources* merupakan salah satu aspek yang menarik untuk diperhatikan terkait pengaruhnya terhadap pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Pengaruh *societal sources* terhadap kebijakan luar negeri terlihat dari opini publik yang dikelola oleh kelompok kepentingan dan media massa. Jika opini publik tersebut digaungkan secara konsisten maka tingkat keberhasilan dalam mengambil peran saat perumusan kebijakan luar negeri juga akan meningkat.

Bukti bahwa *societal sources* memiliki peran dalam perumusan kebijakan luar negeri suatu negara terlihat dari gerakan 'No More Vietnam War' yang disuarakan oleh penduduk Amerika Serikat agar Amerika Serikat tidak melakukan intervensi terhadap

konflik di Nicaragua (Dorani, 2018). Di Korea Selatan, suara publik berhasil mempengaruhi pemerintah Korea Selatan untuk membatalkan perjanjian General Security of Military Informaton Agreement dengan Jepang pada tahun 2012 (Snyder, Lee, Kim, & Kim, 2018).

## 2. Konsep Demokrasi

Demokrasi merupakan salah satu konsep dalam pemerintahan yang dikenal dengan meletakkan rakyat sebagai salah satu unsur utamanya. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yakni *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* yang berarti kekuasaan. Konsep demokrasi mengedepankan kondisi dimana kekuasaan tertinggi dimiliki oleh rakyat karena jalannya pemerintahan menganut prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang seluruh keputusan atau kebijakannya dibuat berdasarkan keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh rakyat (Muntoha, 2009). Sementara itu, Robert Dahl menjelaskan demokrasi merupakan kondisi dimana terdapatnya permasalahan hak pilih dalam masyarakat; seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam dalam proses pembuatan kebijakan; seluruh warga negara memiliki peluang yang sama untuk memberikan penilaian terhadap kondisi politik dalam negeri; warga negara memiliki peran dalam mengontrol agenda pemerintahan; dan tercakupnya seluruh warga dalam demokrasi (Muntoha, 2009).

Pendapat Sidney Hook dan Robert Dahl menjelaskan bahwa demokrasi memiliki keterikatan erat dengan kondisi dalam negeri khususnya peran rakyat. Pemerintahan dapat berjalan dengan baik jika

rakyat terlibat dalam segala aspek. Proses perumusan keputusan atau kebijakan harus melibatkan rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan dan partisipasi rakyat juga berperan dalam proses implementasi kebijakan atau keputusan yang dihasilkan. Pengawasan rakyat terhadap jalannya pemerintahan juga memiliki perannya tersendiri dalam terciptanya negara yang demokratis.

Jika diaplikasikan ke tindakan-tindakan Korea Selatan yang bertentangan dengan isi perjanjian *2015 Japan-ROK Agreement on Comfort Women* maka dapat diindikasikan bahwa perubahan sikap Korea Selatan tersebut merupakan sebuah produk dari suatu kebijakan luar negeri baru. Perubahan sikap tersebut disebabkan oleh adanya hal-hal tertentu yang mendorong Korea Selatan untuk mengubah kebijakan luar negerinya terhadap Jepang.

Sesuai dengan unsur pendukung kebijakan luar negeri yang dijelaskan oleh James N. Rosenau, ada unsur-unsur tertentu yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan luar negeri baru dalam pemerintahan Korea Selatan. Dalam kasus *comfort women* dan perjanjian dengan Jepang, perubahan kebijakan luar negeri Korea Selatan dikarenakan adanya dominasi pengaruh dari aspek kondisi sosial dalam negeri (*societal sources*) dalam proses perumusan kebijakan luar negeri. Besarnya pengaruh aspek *societal sources* terbukti dari aktif dan konsistennya para aktor *societal sources* yang terlibat dalam memperjuangkan isu *comfort women*.

Selain itu, dominasi aspek *societal sources* juga dibuktikan dari indeks demokrasi Korea Selatan yang meningkat setelah kontroversi perjanjian *comfort women* pada tahun 2015 hingga 2016. Indeks demokrasi sendiri merupakan sebuah alat ukur terhadap seberapa besar nilai-nilai demokrasi diterapkan oleh suatu negara. Salah satu lembaga riset, The Economist Intelligence Unit, nilai

demokrasi suatu negara diukur secara menyeluruh terhadap aspek proses pemilihan dan pluralisme; budaya politik; partisipasi politik; kebebasan sipil; dan kualitas pemerintah. Naiknya indeks demokrasi Korea Selatan dimanfaatkan oleh pemerintah Korea Selatan untuk lebih serius dalam memperhatikan suara dari *societal sources* termasuk dalam perumusan kebijakan luar negeri mengenai isu *comfort women*.

Dominasi aspek kondisi sosial dalam negeri (*societal sources*) terhadap isu *comfort women* tercermin dari adanya golongan masyarakat yang menggaungkan isu keadilan terhadap para korban *comfort women*. Golongan masyarakat tersebut mempromosikan nilai dan norma tentang hak asasi manusia secara terus menerus. Isu *comfort women* dan hak asasi manusia yang digabungkan oleh kelompok masyarakat ini kemudian disebar luaskan oleh media massa sehingga isu ini menjadi perhatian oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk para politisi dan pemerintah Korea Selatan.

Dalam *societal sources*, kelompok kepentingan, media massa, dan individu yang memiliki pengaruh dalam masyarakat saling bekerja sama untuk menjadikan isu *comfort women* dan hak asasi manusia menjadi perhatian publik. Para aktor dalam *societal sources* ini tidak hanya saling berinteraksi dengan sesamanya, namun juga menjalin hubungan dengan tokoh birokratik dan lembaga pemerintahan agar keinginan atau tuntutan mereka dapat diproses lebih cepat dalam mekanisme pembentukan kebijakan luar negeri.

Dari banyaknya aktor yang ada dalam *societal sources*, ada tiga aktor yang paling berperan dalam memperkuat faktor *societal sources* dipertemuan kebijakan luar negeri Korea Selatan. Tiga aktor tersebut adalah media massa, kelompok pelajar-mahasiswa, dan The Korean Council. Kelompok pelajar-mahasiswa dan The Korean Council merupakan organisasi yang dibentuk oleh

masyarakat Korea Selatan untuk mendampingi dan menyuarakan tuntutan dari para korban *comfort women* yakni pemulihan martabat dan hak asasi korban. The Korean Council merupakan aktor paling utama diantara media massa dan kelompok pelajar-mahasiswa karena selain mempromosikan pemenuhan hak asasi manusia, organisasi ini juga menekankan pentingnya pencegahan terhadap kekerasan atau perbudakan seksual terhadap wanita dalam zona perang, membantu wanita dan anak-anak yang menderita akibat perang, dan penyelesaian masalah pasca perang dengan adil (The Korean Council, n.d).

The Korean Council dan Kelompok pelajar-mahasiswa hadir ditengah-tengah masyarakat Korea Selatan dan internasional untuk menunjukkan bahwa masalah kejahatan perang yang terjadi di Korea Selatan pada saat penjajahan Jepang masih belum selesai meskipun Korea Selatan dan Jepang telah melakukan perjanjian tentang isu ini. Dua organisasi ini menilai bahwa poin-poin dalam perjanjian tersebut tidak mencerminkan aspirasi dan kebutuhan dasar para korban *comfort women*. Para aktivis dan korban *comfort women* menginginkan kompensasi yang bersifat non-material yakni pemenuhan hak asasi para korban yang telah dilanggar oleh Jepang ketika penjajahan berlangsung. Kompensasi non-material tersebut berupa pengakuan atas kejahatan perang, permintaan maaf resmi dan reparasi hukum, penyelidikan kebenaran, dan hukuman terhadap para pelaku (The Korean Council, n.d).

Atas perbedaan tindakan pemerintah Korea Selatan dan keinginan korban itulah, The Korean Council, Kelompok pelajar-mahasiswa, dan media massa terus melakukan sosialisasi nilai kepada pemerintah Korea Selatan dan Jepang agar mengubah isi perjanjian *comfort women*. Tindakan The Korean Council dalam mendorong perubahan sikap Korea Selatan adalah dengan melakukan demonstrasi setiap hari Rabu di depan Kedutaan Besar Jepang untuk Korea Selatan. Sementara Kelompok pelajar-

mahasiswa melakukan sosialisasi isu *comfort women* kepada generasi muda sebaya. Di lain sisi, media massa membantu perjuangan dengan meliput dan menyebarkan berita mengenai isu *comfort women* kepada khalayak ramai.

Media massa, Kelompok pelajar-mahasiswa, dan The Korean Council dengan beragam tindakannya dalam mempromosikan kembali nilai-nilai hak asasi manusia yang dilupakan oleh pemerintah Korea Selatan ketika melakukan perjanjian dengan Jepang merupakan penerapan nyata dari peran faktor *societal sources* dalam perumusan kebijakan luar negeri versi James N. Rosenau. Kelompok pelajar-mahasiswa dan The Korean Council dibantu media massa berupaya untuk mengiring opini publik dan menyadarkan pemerintah Korea Selatan untuk melakukan perubahan perjanjian *2015 Japan-ROK Agreement on Comfort Women*. Dorongan untuk perubahan tersebutlah yang membuat Korea Selatan meredefinisi kepentingan nasionalnya dan arah kebijakan luar negerinya. Nilai yang diingatkan kembali oleh media massa, kelompok pelajar-mahasiswa, The Korean Council, dan masyarakat Korea Selatan mampu mengubah kepentingan nasional dan arah kebijakan luar negeri Korea Selatan menuju hal-hal yang tidak bersifat material namun lebih ke arah citra, identitas, dan harga diri negara yang sifatnya non-material.

#### **D. Hipotesa**

Dari uraian latar belakang, rumusan masalah, dan kerangka pemikiran, maka hipotesa yang terbentuk adalah Korea Selatan melakukan tindakan yang bertentangan dengan isi Perjanjian *2015 Japan-ROK Agreement on Comfort Women* karena adanya dorongan dan pengaruh yang intens dari aktor sosial dalam negeri. Aktor sosial dalam kasus ini direpresentasikan oleh media massa, kelompok pelajar-mahasiswa, dan The Korean Council.

## **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan isu *comfort women* di Korea Selatan.
2. Menjelaskan proses dan implementasi dari Perjanjian *2015 Japan-ROK Agreement on Comfort Women*.
3. Menjelaskan penyebab dari perubahan sikap Korea Selatan yang menjadi bertentangan dengan Perjanjian *2015 Japan-ROK Agreement on Comfort Women*.

## **F. Metodologi Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat eksplanatif untuk menjelaskan penyebab perubahan tindakan Korea Selatan yang menjadi bertentangan dengan isi Perjanjian *2015 Japan-ROK Agreement on Comfort Women*. Penulis dalam mengumpulkan segala informasi dan bahan penunjang penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan melalui buku, jurnal, dokumen resmi negara, dan artikel berita.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar karya tulis ini menjadi sistematis, maka penulis membagi sistematika penulisan menjadi lima bab yaitu:

Bab I, menjelaskan mengenai latar belakang masalah dalam perubahan tindakan dan kebijakan Korea Selatan terhadap Jepang, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II, membahas tentang dinamika hubungan Korea Selatan dan Jepang sebelum penjajahan, saat penjajahan dan pasca penjajahan.



Bab III, menjelaskan isu *comfort women*, upaya penyelesaian isu oleh Korea Selatan dan Jepang, perjanjian *2015 Japan-ROK Agreement on comfort women*, dan hubungan Korea Selatan-Jepang pasca perjanjian *comfort women*.

Bab IV, menyajikan penyebab dari berubahnya tindakan Korea Selatan terhadap Jepang dan menjelaskan bagaimana penyebab tersebut mempengaruhi tindakan Korea Selatan di ranah internasional.

Bab V, berisi rangkuman dari bab-bab sebelumnya yaitu kesimpulan.